

**PENGUATAN INFRASTRUKTUR KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DI KOTA SUNGAI PENUH**

Ely Dafrianti

Perencana Ahli Muda, Pemerintah Kota Sungai Penuh

Email Korespondensi: elydafrianti72@gmail.com

ABSTRACT

The development of an agropolitan area based on horticultural and plantation commodities is a strategic approach to improve agricultural productivity, strengthen commodity competitiveness, and promote sustainable regional economic growth in Sungai Penuh City. The area has considerable potential in horticulture and plantation commodities, but its development is constrained by inadequate supporting infrastructure, weak inter-agency coordination, suboptimal planning and financing, limited post-harvest facilities, and restricted distribution and market access. This policy paper aims to formulate a feasible policy direction for developing an integrated agropolitan area. The analysis uses a descriptive policy-analysis approach, problem prioritization through Urgency, Seriousness, and Growth (USG), SWOT analysis of policy alternatives, and evaluation using William N. Dunn's criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Interviews were conducted with four relevant stakeholders: Bapperida, the agriculture agency, the plantation sector, and farmer/agropolitan groups. The USG results identify inadequate agropolitan infrastructure as the highest-priority problem, with a score of 57, followed by limited market and distribution access with 56. Comparative policy assessment shows that strengthening cross-sector governance and coordination obtains the highest average score (9.2), while basic infrastructure development obtains 9.1. Therefore, the recommended policy is an integrated agropolitan development package that places governance and coordination as the enabling mechanism and infrastructure improvement as the main physical intervention. Implementation should be supported by local regulation, a master plan, coordinated financing, institutional strengthening, infrastructure development, market partnerships, and periodic monitoring and evaluation.

Keywords: Agropolitan area, Horticulture, Plantation, Agricultural infrastructure, Public policy.

ABSTRAK

Pengembangan kawasan agropolitan berbasis tanaman hortikultura dan perkebunan merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat daya saing komoditas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di Kota Sungai Penuh. Daerah ini memiliki potensi komoditas hortikultura dan perkebunan yang cukup besar, tetapi pengembangannya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendukung, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, belum optimalnya perencanaan dan pembiayaan, keterbatasan fasilitas pascapanen, serta akses distribusi dan pemasaran yang belum memadai. Policy paper ini bertujuan merumuskan arah kebijakan yang layak untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis kebijakan deskriptif, penentuan prioritas masalah menggunakan Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis SWOT terhadap alternatif kebijakan, serta evaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Wawancara dilakukan terhadap empat pemangku kepentingan yang relevan, yaitu Bapperida, perangkat daerah urusan pertanian, perangkat daerah urusan perkebunan, dan kelompok tani/agropolitan. Hasil USG menunjukkan bahwa belum memadainya infrastruktur kawasan agropolitan menjadi masalah prioritas dengan skor 57, diikuti keterbatasan akses pemasaran dan distribusi dengan skor 56. Evaluasi alternatif menunjukkan penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 9,2, sedangkan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar memperoleh 9,1. Oleh karena itu, kebijakan yang

direkomendasikan adalah paket pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu dengan tata kelola dan koordinasi sebagai mekanisme pengungkit serta penguatan infrastruktur sebagai intervensi fisik utama. Implementasi perlu didukung regulasi daerah, master plan, pembiayaan terkoordinasi, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, kemitraan pemasaran, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Keywords: Kawasan agropolitan, Hortikultura, Perkebunan, Infrastruktur pertanian, Kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah yang berorientasi pada sektor pertanian merupakan salah satu pendekatan penting bagi daerah yang memiliki sumber daya alam dan karakteristik agroekosistem yang mendukung. Pengembangan kawasan berbasis pertanian tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk membangun keterkaitan antara kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Kerangka tersebut sejalan dengan konsep kawasan agropolitan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak aktivitas ekonomi melalui sistem agribisnis yang terintegrasi. Dalam konteks penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjadi salah satu landasan dalam pemanfaatan ruang berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.

Kota Sungai Penuh memiliki kondisi geografis dan agroklimat yang mendukung pengembangan berbagai komoditas hortikultura dan perkebunan. Komoditas seperti kentang, cabai, tomat, bawang merah, sayuran, buah-buahan, kopi, dan kayu manis memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. Data wilayah menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Kota Sungai Penuh mencapai 8.517,34 ha, sedangkan lahan hortikultura dan perkebunan tersebar terutama di Kecamatan Koto Baru, Kumun Debai, Pesisir Bukit, Pondok Tinggi, dan Sungai Bungkal. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan kawasan agropolitan yang berbasis pada komoditas unggulan daerah.

Namun, besarnya potensi belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pendukung yang memadai. Infrastruktur seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, fasilitas pascapanen, gudang penyimpanan, rumah kemas, dan sarana distribusi masih menjadi kendala. Komoditas hortikultura yang bersifat mudah rusak membutuhkan penanganan pascapanen dan distribusi yang cepat. Keterbatasan tersebut dapat meningkatkan biaya distribusi, menurunkan kualitas produk, dan memperlemah posisi tawar petani.

Permasalahan juga terdapat pada sisi kelembagaan dan tata kelola. Kelompok tani dan Gapoktan belum sepenuhnya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang kuat, sementara koordinasi antarperangkat daerah masih menghadapi kecenderungan sektoral. Dukungan pembiayaan, akses teknologi, informasi pasar, serta pengembangan agroindustri juga belum optimal. Di sisi lain, tekanan alih fungsi lahan dapat mengurangi kapasitas produksi pertanian apabila tidak dikendalikan secara tepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperbaiki perencanaan, kelembagaan, pembiayaan, koordinasi, dan sistem pemeliharaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dikaji dalam policy paper ini adalah bagaimana menentukan prioritas masalah dan alternatif kebijakan yang paling layak untuk memperkuat pengembangan kawasan agropolitan berbasis tanaman hortikultura dan perkebunan di Kota Sungai Penuh. Secara khusus, kajian diarahkan untuk menjawab: (1) masalah apa yang paling prioritas; (2) alternatif kebijakan apa yang paling layak; dan (3) bagaimana arah implementasi kebijakan yang dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

METODE

Policy paper ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam analisis kebijakan publik. Data dan informasi bersumber dari dokumen perencanaan dan statistik daerah serta hasil wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan kawasan agropolitan. Dokumen yang digunakan antara lain data Badan Pusat Statistik, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, RPJMD, RKPD, serta regulasi yang relevan. Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness,

Growth). Urgency menunjukkan tingkat kebutuhan suatu masalah untuk segera ditangani; seriousness menunjukkan besarnya dampak apabila masalah tidak segera diselesaikan; sedangkan growth menunjukkan potensi masalah berkembang menjadi lebih kompleks. Setiap indikator diberi skor 1–5 dan dijumlahkan untuk memperoleh nilai prioritas. Penilaian dilakukan oleh empat narasumber, yaitu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Kota Sungai Penuh, Kepala Bidang Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan pada perangkat daerah urusan pertanian, serta Ketua Kelompok Tani/Kelompok Agropolitan Kota Sungai Penuh.

Setelah masalah prioritas ditentukan, disusun empat alternatif kebijakan dan dianalisis menggunakan SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Alternatif tersebut meliputi: (1) peningkatan pembangunan infrastruktur dasar kawasan agropolitan; (2) penyediaan sarana dan prasarana pendukung agribisnis; (3) penguatan pembiayaan pembangunan infrastruktur; dan (4) penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor. Selanjutnya, setiap alternatif dinilai menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penilaian dilakukan pada skala 1–10 melalui wawancara dan diskusi dengan empat narasumber yang sama. Pemilihan kebijakan tidak hanya mempertimbangkan skor tertinggi, tetapi juga konsistensi antara hasil penilaian, akar masalah, kebutuhan implementasi, dan keberlanjutan kebijakan. Karena hasil evaluasi menunjukkan skor tertinggi pada tata kelola dan koordinasi lintas sektor, sedangkan hasil USG menunjukkan infrastruktur sebagai masalah prioritas, rekomendasi akhir diarahkan pada kebijakan terpadu: tata kelola dan koordinasi menjadi pengungkit implementasi, sedangkan pembangunan infrastruktur menjadi intervensi fisik utama.

PEMBAHASAN

Kondisi dan Potensi Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan di Kota Sungai Penuh memiliki basis sumber daya yang relatif kuat. Struktur wilayah menggabungkan aktivitas perkotaan dengan aktivitas perdesaan yang masih didominasi lahan pertanian dan didukung kegiatan perdagangan serta pariwisata. Potensi tersebut membuka peluang pengembangan kawasan yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pusat pengolahan, distribusi, dan pemasaran.

Data tahun 2024 memperlihatkan keragaman komoditas hortikultura dan perkebunan. Komoditas hortikultura yang tercatat antara lain alpukat, jeruk, cabai, bawang merah, kentang, pisang, dan manggis. Pada subsektor perkebunan terdapat casiavera, kopi arabika, kopi robusta, kakao, cengkeh, kemiri, pinang, tembakau, kelapa, pala, dan tebu. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan tidak harus bertumpu pada satu komoditas, tetapi dapat diarahkan berdasarkan kesesuaian wilayah, nilai ekonomi, pasar, dan kemampuan pengolahan.

Meskipun demikian, potensi komoditas belum otomatis menghasilkan nilai tambah yang optimal. Produk masih menghadapi persoalan akses pasar, fasilitas pascapanen, distribusi, teknologi, pembiayaan, dan kelembagaan. Oleh sebab itu, pendekatan agropolitan perlu menghubungkan produksi dengan infrastruktur dan tata kelola kawasan agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada produksi primer.

Prioritas Masalah Berdasarkan Analisis USG

Hasil wawancara menunjukkan lima permasalahan utama, yaitu infrastruktur pendukung kawasan yang belum memadai; akses pemasaran dan rantai distribusi yang masih terbatas; sarana dan prasarana produksi yang belum optimal; kelembagaan petani dan koordinasi pemangku kepentingan yang masih lemah; serta dukungan kebijakan dan pendanaan yang masih terbatas. Rekapitulasi skor USG menunjukkan bahwa infrastruktur memperoleh nilai tertinggi.

Tabel 1: Rekapitulasi skor USG

No.	Permasalahan	U	S	G	Total	Prioritas
1	Infrastruktur pendukung kawasan agropolitan belum memadai	19	19	19	57	I

2	Akses pemasaran dan rantai distribusi hasil pertanian masih terbatas	19	19	18	56	II
3	Dukungan kebijakan dan pendanaan masih terbatas	17	16	17	50	III
4	Ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian belum optimal	16	16	16	48	IV
5	Kelembagaan petani dan koordinasi antar pemangku kepentingan masih lemah	16	14	14	44	V

Sumber: Hasil analisis berdasarkan wawancara empat narasumber.

Nilai 57 pada infrastruktur menunjukkan bahwa persoalan fisik kawasan dipandang paling mendesak, serius, dan berpotensi berkembang apabila tidak ditangani. Infrastruktur yang belum memadai mencakup jalan usaha tani, jaringan irigasi, sarana transportasi hasil pertanian, fasilitas pascapanen, gudang penyimpanan, rumah kemas, dan sarana distribusi. Keterbatasan tersebut berpengaruh langsung terhadap biaya dan waktu distribusi serta kualitas hasil pertanian.

Permasalahan kedua adalah akses pemasaran dan distribusi dengan nilai 56. Posisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu disertai penguatan rantai pemasaran. Pembangunan fisik tanpa akses pasar berisiko menghasilkan fasilitas yang tidak memberikan manfaat ekonomi optimal. Sementara itu, dukungan kebijakan dan pendanaan dengan nilai 50 menunjukkan perlunya kerangka kelembagaan dan pembiayaan yang dapat menjaga keberlanjutan intervensi.

Berdasarkan hasil tersebut, problem statement policy paper ini dirumuskan sebagai berikut: “Belum memadainya infrastruktur kawasan agropolitan, yang diperkuat oleh keterbatasan koordinasi, pembiayaan, sarana pendukung, dan sistem pemeliharaan, menghambat keterhubungan produksi, pascapanen, distribusi, dan pemasaran komoditas hortikultura dan perkebunan di Kota Sungai Penuh.”

Akar Penyebab dan Implikasi Masalah

Masalah infrastruktur tidak berdiri sendiri. Akar penyebab pada level pertama meliputi keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan, perencanaan infrastruktur yang belum terpadu, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, penyediaan sarana pendukung yang belum memadai, dan sistem pemeliharaan yang belum optimal. Pada level kedua, faktor tersebut berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah, prioritas anggaran, belum tersedianya master plan yang komprehensif, belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif, serta keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan pemeliharaan.

Implikasinya bersifat ekonomi dan kelembagaan. Infrastruktur yang lemah dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi, memperbesar kehilangan hasil, menurunkan kualitas produk, dan mengurangi daya saing komoditas. Pada saat yang sama, koordinasi yang lemah dapat menyebabkan program antarperangkat daerah berjalan parsial. Dengan demikian, solusi tidak cukup berupa penambahan aset fisik, tetapi harus mencakup tata kelola, penganggaran, pembagian peran, dan pemeliharaan.

Alternatif Kebijakan dan Analisis SWOT

Empat alternatif kebijakan disusun untuk merespons masalah prioritas. Alternatif pertama menekankan pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani, jalan produksi, jembatan, jaringan irigasi, embung, dan drainase. Alternatif kedua berfokus pada rumah kemas, gudang penyimpanan, pasar tani, cold storage, dan pusat distribusi. Alternatif ketiga diarahkan pada diversifikasi pembiayaan melalui APBD, DAK, dana desa, KPBU, dan investasi swasta. Alternatif keempat menekankan penyusunan master plan dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Tabel 2: Alternatif Kebijakan

Alternatif	Kekuatan utama	Kelemahan utama	Peluang	Ancaman
I. Infrastruktur dasar	Aksesibilitas dan produktivitas	Investasi awal besar;	Dukungan pemerintah,	Keterbatasan anggaran, bencana,

	meningkat; distribusi lebih efisien	membutuhkan pemeliharaan	DAK, dana desa, investasi	keterlambatan, lahan
II. Sarana agribisnis	Mengurangi kehilangan hasil; meningkatkan kualitas dan nilai tambah	Biaya pengelolaan tinggi; perlu SDM	Kemitraan usaha, koperasi, agroindustri	Fluktuasi harga, persaingan, fasilitas tidak optimal
III. Pembiayaan	Diversifikasi sumber dana dan keberlanjutan pembangunan	Proses kompleks; tergantung kebijakan fiskal	KPBU, investasi swasta, sumber nasional	Perubahan anggaran, minat investor, keterlambatan
IV. Tata kelola	Sinkronisasi program dan pembagian peran lebih jelas	Koordinasi membutuhkan komitmen	Reformasi birokrasi, digitalisasi, master plan	Ego sektoral dan perubahan kepemimpinan

Evaluasi Kelayakan Alternatif Kebijakan

Evaluasi menggunakan enam kriteria Dunn menunjukkan bahwa seluruh alternatif berada pada tingkat layak, tetapi terdapat perbedaan tingkat prioritas. Hasil penilaian rata-rata adalah sebagai berikut.

Alternatif	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Ketepatan	Rata-rata
I. Infrastruktur dasar	9,8	8,3	9,5	8,5	8,8	9,8	9,1
II. Sarana pendukung agribisnis	8,8	7,8	8,5	7,8	8,5	8,8	8,4
III. Penguatan pembiayaan	8,8	8,8	8,5	7,8	8,5	8,8	8,5
IV. Tata kelola dan koordinasi	9,5	8,8	9,5	8,8	8,8	9,8	9,2

Sumber: Hasil analisis wawancara empat narasumber.

Alternatif IV memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 9,2. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tata kelola dan koordinasi merupakan faktor pengungkit yang sangat penting karena dapat memperjelas pembagian peran, menyinkronkan program, mengurangi tumpang tindih kegiatan, dan mengintegrasikan perencanaan. Alternatif I berada sangat dekat dengan skor 9,1 dan tetap menjadi intervensi fisik utama karena infrastruktur merupakan masalah dengan skor USG tertinggi.

Temuan tersebut menghasilkan implikasi penting bagi desain kebijakan. Kebijakan tidak sebaiknya memilih antara tata kelola atau infrastruktur secara eksklusif. Infrastruktur adalah kebutuhan utama yang dirasakan langsung di kawasan, sedangkan tata kelola merupakan prasyarat agar pembangunan fisik tepat sasaran, terkoordinasi, memiliki pembiayaan, dan dapat dipelihara. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dirumuskan sebagai penguatan infrastruktur kawasan agropolitan secara terpadu dengan tata kelola dan koordinasi lintas sektor sebagai mekanisme pengungkit.

Alternatif II dan III tetap diperlukan sebagai kebijakan pendukung. Fasilitas pascapanen, gudang, rumah kemas, dan pusat distribusi diperlukan untuk memastikan infrastruktur memberikan manfaat ekonomi sampai tahap pemasaran. Diversifikasi pembiayaan juga dibutuhkan agar pembangunan dan pemeliharaan tidak hanya bergantung pada satu sumber anggaran.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan yang direkomendasikan adalah “Penguatan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Berbasis Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Secara Terpadu di Kota Sungai Penuh”. Kebijakan ini menggabungkan empat komponen: penguatan tata kelola dan koordinasi; pembangunan infrastruktur dasar; penyediaan sarana pendukung agribisnis; serta penguatan pembiayaan dan kelembagaan.

Pertama, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menetapkan regulasi daerah sebagai dasar koordinasi pengembangan kawasan agropolitan. Regulasi perlu mengatur penetapan kawasan prioritas, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, sumber pembiayaan, pengelolaan fasilitas, serta monitoring dan evaluasi.

Kedua, perlu disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang memuat kawasan prioritas, komoditas unggulan, kebutuhan infrastruktur, strategi kelembagaan, rencana pembiayaan, dan indikator kinerja.

Ketiga, pembangunan fisik diarahkan pada jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi, embung, drainase, fasilitas pascapanen, rumah kemas, gudang, dan sarana distribusi. Prioritas pembangunan perlu didasarkan pada konsentrasi komoditas, kebutuhan petani, konektivitas dengan pasar, dan kesiapan kelembagaan pengelola.

Keempat, penguatan kelembagaan dilakukan melalui kelompok tani, Gapoktan, koperasi, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas SDM. Kelima, akses pemasaran diperluas melalui kemitraan, promosi komoditas unggulan, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan pengolahan hasil.

Kebijakan tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Sumber pembiayaan dapat dikombinasikan melalui APBD, DAK, dana desa sesuai kewenangan, serta kerja sama dengan dunia usaha. Pemeliharaan harus diperlakukan sebagai bagian dari desain kebijakan sejak awal, bukan sebagai kegiatan setelah infrastruktur selesai.

Tahapan Implementasi

Tahap	Fokus	Kegiatan utama	Output/indikator
I. Persiapan	Regulasi dan koordinasi	Pembentukan tim; Perwako; master plan; penetapan kawasan/komoditas prioritas	Regulasi ditetapkan; tim terbentuk; master plan tersedia
II. Kelembagaan	Perencanaan dan kapasitas	Penguatan kelompok tani/Gapoktan/koperasi; peningkatan kapasitas; SOP koordinasi; integrasi ke dokumen daerah	Kelompok aktif; SDM terlatih; mekanisme koordinasi tersedia
III. Infrastruktur	Pembangunan kawasan	Jalan usaha tani; irigasi; embung; gudang; rumah kemas; fasilitas pascapanen dan distribusi	Infrastruktur terbangun dan dimanfaatkan petani
IV. Produksi & pasar	Daya saing	Teknologi budidaya/pascapanen; kemitraan; pembiayaan; pemasaran; pengolahan	Produktivitas dan akses pasar meningkat; biaya distribusi menurun
V. Monev	Keberlanjutan	Monitoring indikator; evaluasi; perbaikan kebijakan	Laporan monev dan perbaikan program

Tahap implementasi perlu disusun mengikuti siklus perencanaan daerah. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan regulasi, tim koordinasi, kawasan prioritas, dan master plan. Tahap berikutnya memperkuat kelembagaan dan memasukkan program ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran. Setelah kesiapan kelembagaan terbentuk, pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara bertahap. Selanjutnya, intervensi diarahkan pada penguatan produksi, kemitraan, pengolahan, dan pemasaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai capaian dan melakukan penyesuaian.

Pembagian Peran Aktor

Aktor	Peran utama
Wali Kota	Pengarah kebijakan, pengesahan regulasi, dan keputusan strategis.
Bapperida	Koordinator perencanaan, sinkronisasi program, dan monitoring implementasi.
Dinas Pertanian	Peningkatan produktivitas, komoditas unggulan, teknologi, dan kelembagaan petani.
Dinas PUPR	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan sesuai kewenangan.
Dinas Perdagangan/Perindustrian	Penguatan pasar, distribusi, promosi, dan jejaring pemasaran.
Dinas Koperasi dan UMKM	Penguatan kelembagaan usaha, kapasitas UMKM, dan kemitraan.
Pemerintah desa	Dukungan pelaksanaan kawasan dan pengelolaan fasilitas sesuai kewenangan.
Kelompok tani/koperasi	Produksi, pemanfaatan fasilitas, pengelolaan usaha, dan kemitraan.
Dunia usaha/lembaga keuangan	Kemitraan, pembiayaan, pengolahan, dan akses pasar.

Proyeksi Dampak Kebijakan

Apabila kebijakan dilaksanakan secara konsisten, dampak yang diharapkan mencakup peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur, kelancaran konektivitas sentra produksi dengan pasar, penurunan biaya produksi dan distribusi, peningkatan kualitas serta nilai tambah komoditas, dan peningkatan pendapatan petani. Pada tingkat kelembagaan, kebijakan diharapkan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, kelompok tani, koperasi, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam jangka menengah, kawasan diharapkan berkembang sebagai sistem ekonomi pertanian yang lebih terintegrasi. Infrastruktur produksi dan distribusi dapat mendukung peningkatan produktivitas, sedangkan fasilitas pascapanen dan pengolahan dapat mengurangi kehilangan hasil serta meningkatkan nilai tambah. Dalam jangka lebih panjang, integrasi kawasan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran berpotensi memperkuat daya saing komoditas hortikultura dan perkebunan Kota Sungai Penuh.

Indikator keberhasilan yang perlu dipantau meliputi kualitas dan cakupan infrastruktur, tingkat pemanfaatan fasilitas, produktivitas komoditas unggulan, biaya distribusi, akses pasar, nilai tambah produk, pendapatan petani, jumlah kemitraan, efektivitas koordinasi, serta keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur. Pengukuran indikator secara berkala penting agar kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan hasil implementasi.

KESIMPULAN

1. Pengembangan kawasan agropolitan berbasis hortikultura dan perkebunan di Kota Sungai Penuh memiliki potensi yang kuat, tetapi belum didukung secara optimal oleh infrastruktur, sistem pemasaran, kelembagaan, pembiayaan, dan koordinasi lintas sektor.
2. Hasil analisis USG menempatkan belum memadainya infrastruktur kawasan agropolitan sebagai masalah prioritas dengan skor 57, diikuti keterbatasan akses pemasaran dan rantai distribusi dengan skor 56. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan intervensi utama.
3. Hasil evaluasi alternatif berdasarkan kriteria Dunn menunjukkan penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 9,2, sedangkan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar memperoleh 9,1. Karena itu, rekomendasi paling konsisten adalah kebijakan terpadu yang menempatkan tata kelola sebagai mekanisme pengungkit dan infrastruktur sebagai intervensi fisik utama.
4. Implementasi kebijakan perlu dilakukan melalui regulasi daerah, pembentukan tim koordinasi, penyusunan master plan, integrasi program dan anggaran, pembangunan infrastruktur prioritas,

penguatan kelembagaan petani, pengembangan kemitraan dan pasar, serta monitoring dan evaluasi berkala.

5. Pemerintah Kota Sungai Penuh disarankan mengintegrasikan pengembangan kawasan agropolitan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta memastikan skema pemeliharaan infrastruktur, pembagian peran aktor, dan indikator kinerja ditetapkan sejak tahap perencanaan.

REFERENSI

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021–2026. Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. (2024). Kota Sungai Penuh dalam angka 2024. BPS Kota Sungai Penuh.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. (2002). Pedoman pengembangan kawasan agropolitan. Departemen Pertanian.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh. (2024). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh Tahun 2024–2044. Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kota Sungai Penuh. (2024). Statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kota Sungai Penuh Tahun 2024. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kota Sungai Penuh.
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. (2024). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2025. Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.